

TESIS

***KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH:
ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN
KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA***

***LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE
COOPERATIVES: INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE
PRINCIPLE OF COOPERATIVE INDEPENDENCE AND STATE
INTERVENTION***



Oleh:

ADNAN HASANUDIN

NIM: 2310622055

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

JAKARTA

2025

TESIS

***KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH:
ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN
KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA***

***LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE
COOPERATIVES: INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE
PRINCIPLE OF COOPERATIVE INDEPENDENCE AND STATE
INTERVENTION***



Oleh:

ADNAN HASANUDIN

NIM: 2310622055

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

JAKARTA

2025

HALAMAN JUDUL

***KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH:
ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN
KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ADNAN HASANUDIN

NIM: 2310622055

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

JAKARTA

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

***KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH:
ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN
KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA***

Disusun dan diajukan oleh:

ADNAN HASANUDIN

NIM: 2310622001

Telah diuji depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 25 Juni 2025

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Atik Winanti SH, MH,
NIP.196806081994032001

Pembimbing 2



Dr. Aurora Jilena Meliala, SH, MH,
NIK.221112025



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

***KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH:
ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN
KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA***

Disusun dan diajukan oleh:

ADNAN HASANUDIN

NIM.2310622055

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 25 Juni 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Atik Winanti SH, MH,
NIP. 196806081994032001

Pembimbing 2

Dr. Aurora Jilena Meliala, SH, MH,
NIP. 221112025

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sugruman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 25 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Adnan Hasanudin
NIM : 2310622055
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Perdata dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH; ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



FBBB4AMX380303227

Adnan Hasanudin
NIM 2310622055

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Hasanudin
NIM : 2310622055
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH; ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,

 

Adnan Hasanudin
NIM.2310622055

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Atik Winarti S.H.,M.H selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Aurora Jilena Meliala S.H.,M.H yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veterean Jakarta;
5. Bapak Zarkasih dan Ibu Ai Wakidah Tercinta, yang senantiasa tulus ikhlas mendidik dengan kasih sayang, memberi dukungan setiap saat dan terima kasih sudah menjadi orang tua yang kuat dan sabar
6. Terima kasih banyak untuk kedua kakakku, Muhammad Wahyudin dan Taufiq Muzaki atas segala dukungan, doa, dan hiburan selama ini, serta telah menjadi kakak terbaik sepanjang hidupku.
7. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Ibu Hanna Christianti atas segala ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan

8. Terima kasih kepada seluruh staf kustodian, Pak Viktor, Mas Yoga, Mas Ryan, Mba Pino, Mas Ryo, Mas Reo dan Mas Faris atas segala dukungan, doa, dan hiburan selama ini, serta telah menjadi kakak terbaik sepanjang hidupku.
9. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat penyusun selama ini, Balkis, Indah, Syanti, Ramdan, Zidan, Arief, Sella, terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini yang telah senantiasa membantuku.
10. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat "Anak Gang" yang tidak bisa disebutkan satu satu terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini yang telah senantiasa membantuku.
11. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat "Warling" yang tidak bisa disebutkan satu satu terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini yang telah senantiasa membantuku.
12. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat " SMPN 6 Kota Tangerang" yang tidak bisa disebutkan satu satu terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini yang telah senantiasa membantuku.
13. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Kavi Band, Ruth, Panji, Daniel, Dimas, Andar terimakasih atas segala dukungan dan semangatnya. Terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini yang telah senantiasa membantuku.

Jakarta, 22 Mei 2025

Penulis



Adnan Hasanudin

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH: ANALISIS KELEMBAGAAN ANTARA PRINSIP KEMANDIRIAN KOPERASI DAN INTERVENSI NEGARA

Adnan Hasanudin (2310622055), Atik Winarti, Aurora Jilena Meliala

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggabungan peran negara sebagai inisiator, pembiayaan, sekaligus pengarah operasional dalam desain Koperasi Desa Merah Putih disebut juga KDMP. Pembentukan KDMP dapat berpotensi mengaburkan batas antara badan hukum publik dan privat. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Hal ini karena Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Koperasi tidak secara rinci mengatur detail pembiayaan di tingkat desa, sehingga hal ini dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana desain kelembagaan dan norma hukum yang ideal dalam pembentukan koperasi desa yang didanai negara agar tidak bertentangan dengan asas subsidiaritas dan prinsip kemandirian koperasi? Bagaimana kepastian hukum pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari sistem hukum keuangan negara dan prinsip otonomi dalam hukum koperasi Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang, policy analisis dan institutional comparation. Desain kelembagaan dan norma hukum koperasi desa yang didanai negara harus dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan: Asas Subsidiaritas: Negara hanya bertindak bila masyarakat tidak mampu secara mandiri. Kepastian hukum KDMP dalam hal pembiayaan dari negara hanya terjamin bila terdapat dasar hukum yang spesifik, bantuan dari pemerintah tidak boleh mencampuri manajemen dan kebijakan internal koperasi karna itu subsidi atau pembiayaan negara harus bersifat stimulan, bukan ketergantungan.

Kata Kunci: Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, Konflik Norma

ABSTRACT

LEGAL CERTAINTY OF FINANCING OF MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVES: INSTITUTIONAL ANALYSIS BETWEEN THE PRINCIPLE OF COOPERATIVE INDEPENDENCE AND STATE INTERVENTION

Adnan Hasanudin (2310622055), Atik Winarti, Aurora Jilena Meliala

Thesis entitled Legal Certainty of Financing of Red and White Village Cooperatives: Institutional Analysis and Norm Conflict between the Principle of Cooperative Independence and State Intervention This study aims to determine whether the combination of the state's role as an initiator, financier, and operational director of cooperatives, as seen in the KDMP design, has the potential to blur the boundaries between public and private legal entities. The absence of explicit regulations regarding financing of village cooperatives in the Cooperative Law does indeed create legal uncertainty, especially regarding sources of funds, distribution mechanisms, and accountability. This is because the Cooperative Law does not regulate financing details at the village level in detail, thus potentially giving rise to various different interpretations and practices. Uncertainty of Funding Sources: The Cooperative Law does not specifically regulate the sources of funds that can be accessed by village cooperatives. This causes confusion as to whether village cooperatives may only rely on capital from members, or can access other sources of financing such as loans from financial institutions, government grants, or other external sources. Without clear regulations, village cooperatives may have difficulty developing their businesses due to limited capital. Uncertainty of Distribution Mechanism: The Cooperative Law also does not regulate in detail the mechanism for distributing funds to members. This fundamental difference raises the potential for conflicting legal norms, especially regarding the principles of statutory regulations. On the one hand, Law No. 25/1992 guarantees the principle of cooperative independence, namely that cooperatives are formed by and for members, with the spirit of self-help and self-governance. On the other hand, direct state intervention through Presidential Instructions or fiscal instruments, and without clear regulations in the parent cooperative law, can be considered to violate the principle of lex superior derogat legi inferiori (regulations under the law must not conflict with the law), and the principle of legality in the formation of legal entities and the use of public funds. This thesis can be an important contribution to testing whether the KDMP design is normatively in line with or deviates from the applicable cooperative legal principles

Keywords: Financing of the Red and White Village Cooperative, Conflict of Norms

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
Latar Belakang	2
Identifikasi Masalah	5
Rumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	5
Manfaat Penelitian	5
Orisinalitas Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
1) Teori Kepastian Hukum	9
2) Teori Kemandirian Badan Hukum	12
Kerangka Berpikir	32
Definisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
Pendekatan Penelitian	35
Sumber Data dan Bahan Hukum	36
Teknik Pengumpulan data	37
Analisis data	37
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	
1) Bagaimana Desain kelembagaan dan norma hukum yang ideal dalam pembentukan koperasi desa yang didanai negara agar tidak bertentangan dengan asas subsidiaritas dan prinsip kemandirian koperasi?	43

2) Bagaimana kepastian hukum pembiayaan koperasi Desa Merah Putih ditinjau dari sistem hukum keuangan negara dan prinsip otonomi dalam hukum koperasi indonesia.....	50
--	----

BAB V.....	
-------------------	--

PENUTUP.....	
---------------------	--

A. KESIMPULAN.....	
---------------------------	--

B. SARAN.....	
----------------------	--

DAFTAR PUSTAKA.....	
----------------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian.....	11
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	30
-----------------------------------	----